

**PERAN ORANG KRISTEN DI INDONESIA DALAM MEMBANGUN *CIVIL
SOCIETY***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S-1 Fakultas Theologia
Universitas Kristen Duta Wacana

OLEH:

IRVING BOLIVAR NIKOLAS GULTOM

01102314

PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS THEOLOGIA

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

JUNI 2015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

PERAN ORANG KRISTEN DI INDONESIA DALAM MEMBANGUN CIVIL SOCIETY

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

IRVING BOLIVAR NIKOLAS GULTOM

01102314

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sains Teologi pada tanggal 29 Juli 2015

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dr. Kees de Jong

(Dosen Pembimbing //Penguji)



2. Pdt. Robert Setio, Ph.D

(Dosen Penguji)



3. Pdt. Stefanus Christian Haryono, MACF

(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 29 Juli 2015

Disahkan Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi S-1




Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph. D



Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi dengan judul: **KETERLIBATAN TEOLOGI KRISTEN DI INDOENSIA MEMBANGUN *CIVIL SOCIETY*** adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan hasil karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 27 Juni 2015 /

Penyusun,



Irving Bolivar Nikolas Gultom

ABSTRAK

Pasca runtuhnya Orde Baru, *Civil Society* menjadi primadona ditengah usaha-usaha untuk memunculkan kembali semangat demokrasi dan keadilan sosial Indonesia. *Civil Society* secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sebuah upaya mewujudkan masyarakat yang beradab. Merujuk pada 3 pilar sosiologis yang diutarakan Nicanor Perlas yaitu pilar politik, pilar ekonomi, dan pilar sosial. *Civil Society* masuk dalam pilar budaya/sosial. Menurut Perlas pilar sosial mencoba merangkum dan membangun nilai-nilai yang ada untuk mewujudkan keberadaban. Tentu saja nilai agama, secara khusus Kekristenan yang akan banyak dibahas dalam skripsi ini juga turut ikut andil di dalamnya. Ditengah konsep politik Kristen yang cenderung pietis, menjadi penting untuk meneliti sejauh mana nilai-nilai Kekristenan dapat menopang *Civil Society*. Penulis berpendapat Gereja dan *Civil Society* bisa saling membangun, saling memberikan sumbangsih. Melalui Visi Yesus Kristus mengenai Pemerintahan Allah, penulis mencoba menjabarkan sumbangsih nilai dari prespektif Kristen untuk *Civil Society*. Dibantu dengan penafsiran akan matius serta pandangan etika kristen dari beberapa tokoh. Penulis mencoba mewujudkan gereja sebagai wujud dari Pemerintahan Allah, juga sebagai bagian *Civil Society*, sehingga gereja menjadi komunitas perintis kesejahteraan sosial. Gereja masuk dalam praktik-praktik bersama yang mentransformasi pengalaman sosial, dan orang-orang secara moral. Gereja juga harus terus-menerus belajar untuk menawarkan refleksi publik yang matang dan konstruktif demi kebaikan bersama umat manusia di bawah kedaulatan Allah Sang Pencipta. Selain konsep teologis, penulis juga mencoba menjabarkan konsep filosofis yaitu Ruang Publik. Sebagai sebuah upaya untuk menjembatani Pemerintahan Allah dan *Civil Society*. Konsep ruang publik diperlukan untuk membantu menjabarkan nilai nilai Kristen dalam bahasa yang universal sehingga bisa masuk dalam diskusi bersama di masyarakat dalam pembentukan nilai bersama.

Kata Kunci: Pemerintahan Allah, *Civil Society*, Pilar Sosial, Masyarakat Madani, Ruang Publik, Masyarakat Komunikatif, CS Song, Ahmad Baso, AS Hikam, Jurgen Habermas

Lain-Lain:

Hal. V+64

40 (1935-2015)

Dosen Pembimbing: Dr. Kees de Jong

KATA PENGANTAR

Skripsi ini bermula dari sebuah pertanyaan mendasar “Apakah peran orang Kristen di Indonesia?”. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menghasilkan banyak jawaban. Orang Kristen adalah sama dengan orang –orang lainnya, atau bisa kita katakan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat orang Kristen wajib memberikan sumbangsinya bagi masyarakat luas. Penggunaan kata orang Kristen dimaksudkan adalah orang orang yang memiliki/menghidupi nilai nilai Kristiani. Kristen yang dimaksudkan disini kekristenan yang artinya menembus batasan sekte dan denominasi. Maka skripsi ini akan membahas bagaimana orang Kristen yang menghidupi nilai tersebut dalam masyarakat luas. Nilai nilai Kristiani yang dihidupi sehingga berfungsi pada masyarakat inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Skripsi ini berawal dari sebuah diskusi santai penulis dengan rekan Hobert Ospara, kami mempertanyakan sejauh mana sumbangsiah Kekristenan pada Indonesia. Ada beberapa ide-ide yang muncul dari diskusi tersebut. Tetapi kami menemukan suatu asumsi bahwa gerak agama selalu bersifat sekterian dalam membangun Indonesia sama halnya dengan kekristenan. Kekristenan di Indonesia yang kami bayangkan cenderung bersifat seketerian dan kemudian pietisme. Kedua hal ini kami simpulkan sebagai sebuah pekerjaan rumah bagi kekristenan dan orang-orang Kristen dalam membangun Indonesia. Paska diskusi tersebut saya membawa permasalahan sebagai sebuah ide awal dalam pembentukan skripsi ini, dan mendiskusikannya dengan Pak Kees. Saat itu penulis memilih menggunakan konsep teologi politik dalam melihat hal tersebut. Setelah berdiskusi dengan pak kees, penulis melihat teologi politik tidak menyentuh secara langsung sebuah konsep untuk membangun masyarakat luas dari sudut pandang kekristenan.

Upaya pendalaman dan diskusi terus dilakukan penulis, sampai akhirnya menemukan sebuah konsep bernama *Civil Society*. *Civil Society* bukan hal baru dalam hubungannya dengan masyarakat. Ia adalah sebuah cita cita bersama untuk sebuah peradaban. Dan *Civil Society* sebagai konsep membuka dirinya untuk diisi oleh nilai-nilai dari manapun demi tujuan

keberadaban. Nilai-nilai inilah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, nilai apakah yang kekristenan bisa berikan untuk bersumbangsih pada *Civil Society* dan kemudian bagaimana nilai itu dikomunikasikan untuk masyarakat plural. Dua hal inilah yang menjadi pokok bahasan utama dalam skripsi ini, menemukan kemudian membasahkan ulang nilai nilai Kristiani. Skripsi ini penulis anggap sebagai permulaan sebuah peletakan dasar karena proses yang sebenarnya akan berlangsung secara terus menerus sesuai dengan perkembangan Kekristenan dan nilai dianutnya. Maka besar harapa penulis bila setelah skripsi ini muncul penerlitain penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

©UKDW

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Batasan Masalah	6
1.5. Tujuan.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.7. Judul Skripsi.....	7
1.8. Sistematika Tulisan.....	7
BAB 2	8
<i>CIVIL SOCIETY</i> DI INDONESIA.....	8
2.1 Pengantar.....	8
2.2 Jalan Buntu Pancasila	8
2.2.1 Kompromi Antara Agama dan Negara.....	10
2.2.2 Pancasila Sebagai Pengelola Kebudayaan.....	12
2.3. Mengenal <i>Civil Society</i>	13
2.3.1. Pandangan Umum.....	13
2.3.2. Sejarah <i>Civil Society</i>	13
2.3.3. Definisi dan Fungsi <i>Civil Society</i>	17
2.4 <i>Civil Society</i> sebagai Pemikiran di Indonesia	20
2.4.1. Masyarakat Madani.....	22
2.5. <i>Civil Society</i> di dalam 3 Pilar Sosial.....	25
2.6. Kesimpulan.....	26
BAB 3	28
PEMERINTAHAN ALLAH	28
3.1 Pengantar.....	28
3.2 Makna Frasa Kerajaan Allah	29

3.3. Wajah Sang Pekabar Yesus: Dua Realitas yang Menjadi Satu.....	32
3.4. Pemerintahan Allah	34
3.4.1. Visi Yesus Atas Pemerintahan Allah.....	34
3.4.2. Yesus dan Visi Nya Sebagai Sebuah Kesatuan.....	37
3.4.3. Ciri Pemerintahan Allah	38
3.4.4. Kesaksian Tentang Kerajaan Allah	38
3.4.4.2. Merangkul “Yang Lain”	40
3.4.4.3 Penindasan: Penyakit Rohani	41
3.5 Penutup.....	42
BAB 4	44
KETERLIBATAN GEREJA KRISTEN MEMBANGUN <i>CIVIL SOCIETY</i>.....	44
4.1. Pendahuluan.....	44
4.2 <i>Civil Society</i> dan Ruang Publik.....	45
4.2.1 Masyarakat Komunikatif Habermas	46
4.2.2 Demokrasi Deliberatif.....	47
4.2.3 Ruang Publik.....	48
4.3. Un-Civil Society: Sebuah Upaya Mengantisipasi Kelompok Fundamentalis Agama	50
4.4 Tantangan Gereja di Dalam <i>Civil Society</i>	51
4.5 Pemerintahan Allah sebagai <i>Civil Society</i>	53
4.5.1 Gereja Hadir Sebagai Perintis Keadilan Sosial.....	54
4.5.2 Membangun Kepedulian Gereja	55
4.6 Penutup.....	58
BAB 5	60
PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan Akhir.....	60
5.2 Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Pasca runtuhnya Orde Baru, *Civil Society* menjadi primadona ditengah usaha-usaha untuk memunculkan kembali semangat demokrasi dan keadilan sosial Indonesia. *Civil Society* secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sebuah upaya mewujudkan masyarakat yang beradab. Merujuk pada 3 pilar sosiologis yang diutarakan Nicanor Perlas yaitu pilar politik, pilar ekonomi, dan pilar sosial. *Civil Society* masuk dalam pilar budaya/sosial. Menurut Perlas pilar sosial mencoba merangkum dan membangun nilai-nilai yang ada untuk mewujudkan keberadaban. Tentu saja nilai agama, secara khusus Kekristenan yang akan banyak dibahas dalam skripsi ini juga turut ikut andil di dalamnya. Ditengah konsep politik Kristen yang cenderung pietis, menjadi penting untuk meneliti sejauh mana nilai-nilai Kekristenan dapat menopang *Civil Society*. Penulis berpendapat Gereja dan *Civil Society* bisa saling membangun, saling memberikan sumbangsih. Melalui Visi Yesus Kristus mengenai Pemerintahan Allah, penulis mencoba menjabarkan sumbangsih nilai dari prespektif Kristen untuk *Civil Society*. Dibantu dengan penafsiran akan matius serta pandangan etika kristen dari beberapa tokoh. Penulis mencoba mewujudkan gereja sebagai wujud dari Pemerintahan Allah, juga sebagai bagian *Civil Society*, sehingga gereja menjadi komunitas perintis kesejahteraan sosial. Gereja masuk dalam praktik-praktik bersama yang mentransformasi pengalaman sosial, dan orang-orang secara moral. Gereja juga harus terus-menerus belajar untuk menawarkan refleksi publik yang matang dan konstruktif demi kebaikan bersama umat manusia di bawah kedaulatan Allah Sang Pencipta. Selain konsep teologis, penulis juga mencoba menjabarkan konsep filosofis yaitu Ruang Publik. Sebagai sebuah upaya untuk menjembatani Pemerintahan Allah dan *Civil Society*. Konsep ruang publik diperlukan untuk membantu menjabarkan nilai nilai Kristen dalam bahasa yang universal sehingga bisa masuk dalam diskusi bersama di masyarakat dalam pembentukan nilai bersama.

Kata Kunci: Pemerintahan Allah, *Civil Society*, Pilar Sosial, Masyarakat Madani, Ruang Publik, Masyarakat Komunikatif, CS Song, Ahmad Baso, AS Hikam, Jurgen Habermas

Lain-Lain:

Hal. V+64

40 (1935-2015)

Dosen Pembimbing: Dr. Kees de Jong

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Peristiwa Reformasi 1998 menjadi catatan sejarah yang unik di Indonesia ini ketika rakyat akhirnya bergerak bersama, bahkan secara sistematis dan simultan. Alasannya karena rakyat merasa kekuasaan pemerintah dalam hal ini pilar politik yang diwakilkan oleh Rezim Orde Baru terlalu bergaya feodalistik¹ dan menindas. Nuansa feodal ini ternyata terus mendarah-daging pasca Orde Baru. Walaupun bangsa ini telah masuk era reformasi, namun nuansa feodal masih terus terasa seperti yang dikatakan Merry Kolimon:

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk waktu yang sangat lama dalam sejarah perpolitikan di Indonesia apa yang disebut Masyarakat Sipil sangat lemah dan diperlemah serta ditindas. Terutama pada Orde Baru gerakan-gerakan sosial yang membangun bersikap kritis pada pemerintah diberangus. Kita masih ingat banyak aktivis hak asasi manusia tokoh buruh, para pemimpin surat kabar, dan elemen masyarakat lainnya dicekal, dibunuh, atau dihilangkan.²

Merry Kolimon mencatat pemerintahan Orde Baru membawa pengalaman traumatis yang cukup mendalam bagi kehidupan sosial dan politik Indonesia. Maka walaupun Indonesia telah mengalami reformasi ada keraguan apakah bangsa ini sudah menjadi demokratis, karena rakyatnya masih berkonsep feodal setelah puluhan tahun hidup di bawah tekanan pimpinan Orde Baru. Sebuah ungkapan “Demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” semakin utopis. Masyarakat pun akhirnya jatuh dalam ketidakpedulian dan lebih memilih untuk mengurus urusannya sendiri daripada memikirkan urusan politik. Ketidakpedulian ini menyebabkan kontrol rakyat sangat minim sehingga kekuasaan negara (pilar politik) semakin merasuk ke seluruh pilar-pilar masyarakat sosial. Sumbangan masyarakat sosial dan nilai sosial ini, padahal penting bagi negara dalam membangun pemerintah yang demokratis. Permasalahan yang muncul berikutnya adalah peran Kekristenan di Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat Sosial. Dalam hal ini

¹ Sebuah ideologi “pemberangusan” terhadap 1. Daya kritis, 2. Daya kreatif, dan sikap Fundamentalime, akhirnya menciptakan masyarakat yang selalu meminta petunjuk ke atas. Dikutip dari Yasraf Amil Piliang, *Pengantar Jika Rakyat Berkuasa*. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 5.

²Merry Kolimon, “Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil”, dalam *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik PascaOrde Baru*, Zakharia Ngelow dan Julianus Mojau (Peny.), (Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013), hal. 226

mayoritas Kekristenan dibentuk dalam nuansa Pietis. Sedangkan dalam sebuah karangan mengenai peran agama dalam demokrasi, Trisno Sutanto mengungkapkan bahwa teologi masa kini harus bersifat politik.

dunia' tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang kodrati yang alamiah, melainkan lebih sebagai "sejarah" yakni dinamika usaha manusia untuk menata kehidupan bersama, dan karenanya selalu terbuka. Itulah sebabnya teologi kini harus bersifat politis, yakni berkaitan dengan polis, dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama, karena manusia yang disapa oleh pesan-pesan keagamaan bukanlah individu yang hanyalah melulu privat, tetapi sekaligus makhluk sosial.³

Berbicara tentang masyarakat sosial, Nicanor Perlas mengatakan bahwa kehidupan sosial selalu terdiri atas tiga subsistem penting (*three realms/ three subsystems*) yaitu: politik (*politic*), ekonomi (*economy*) dan budaya (*culture*).⁴ Ketiga subsistem ini disebut juga, tiga pilar sosiologis. Interaksi ketiga pilar inilah yang menentukan bentuk kehidupan sosial yang dihidupi masyarakat di Indonesia. Menurut Perlas, kita akan hidup dalam kondisi sosial yang sehat jika ketiga pilar ini saling menopang satu sama lain dan mengembangkan kemampuan mereka masing-masing untuk menyadari bahwa setiap pilar dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap dua pilar lainnya. Dengan kata lain, Perlas hendak juga menyatakan bahwa dominasi berlebihan salah satu atau dua pilar dapat mengesampingkan bahkan menaklukkan salah satu atau dua pilar lainnya, sehingga melahirkan kehidupan sosial yang tidak sehat. Konsep formasi sosial yang diajukan Perlas bisa menjadi contoh, sebuah upaya bagi pembagian kekuasaan yang kembali menghargai budaya sebagai pilar sosial yang berdiri sejajar dengan politik dan ekonomi.

Menurut Perlas, ketiga pilar ini biasanya diwakili oleh tiga institusi kunci yang berpengaruh dalam kehidupan sosial. Demikian pernyataannya: "*Businesses have economic power. Governments have political power. And Civil Society organizations have cultural power. None has a monopoly of power.*"⁵ Perlas menunjukkan beberapa perbedaan fungsi ketiga pilar, salah satunya adalah mengenai dasar hubungan ketiganya (*relationship bases*). Dasar hubungan pemerintahan adalah peraturan/hukum (*rules*). Dasar hubungan bisnis adalah transaksi-transaksi (*transactions*). Sedangkan dasar hubungan organisasi masyarakat sipil

³Trisno, Sutanto. "Agama Agama dan Proyek Demkro(tisa)si", dalam *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, Zakharia Ngelow dan Julianus Mojau (Peny.), (Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013), hal. 158.

⁴Nicanor Perlas, "Social Threefolding", dalam *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>, 2001. diakses tanggal 3 Desember 2014.

⁵Ibid.

adalah nilai-nilai (*values*).⁶ Pendekatan-pendekatan yang ditawarkan hingga saat ini masih berat sebelah pada kebijakan hukum dan pemberdayaan ekonomi, dan akhirnya mengesampingkan pilar ketiga yaitu budaya yang banyak juga berbicara tentang nilai-nilai manusia bahkan spiritualitas.

1.2. Permasalahan

Ketidakpedulian masyarakat yang menyebabkan melemahnya pilar budaya adalah yang akan menjadi pembahasan penulis, sependapat dengan Perlas bahwa pembangunan pilar ini seringkali dikesampingkan dibandingkan dua pilar lain. Bagaimana mungkin masyarakat berbicara demokrasi kalau masyarakat tidak peduli dan juga tidak sadar bahwa mereka juga punya andil dan kuasa dalam sistem sosial? Kekuatan pilar budaya, menurut Perlas memiliki dasar hubungan yang terkait dengan nilai-nilai (*values*).⁷ Aktor utama dalam pilar ini seringkali disebut sebagai *Civil Society* dan pusat perhatiannya adalah pengembangan kapasitas sosial dan spiritual manusia untuk memperluas batas-batas pengetahuan, mencapai kejelasan dan koherensi nilai serta dapat mengadvokasi kepentingan publik.⁸

Sebenarnya *Civil Society* bukan sesuatu yang baru di Indonesia, ketika menjelang akhir rezim Orde Baru, wacana ini berkembang cukup pesat. Lahir sebagai sebuah upaya melunturkan feodalisme dan memunculkan semangat kritis dan kebebasan berpikir dan berwacana di tengah masyarakat. Sebagai sebuah wacana, *Civil Society* memiliki pandangan yang cukup beragam. Ada pandangan yang mencoba menyamakan dengan konsep Masyarakat Madani yang digalakan oleh Nurcholish Madjid ataupun, ada juga yang tetap menggunakan istilah *Civil Society*. Seiring dengan itu, berbagai definisi kian bermunculan.

Menurut Bernard Adeney penggalan makna *Civil Society* menyimpulkan tiga hal:⁹

1. Civil berasal dari kata *civilize* yang berarti beradab, yang berarti masyarakat beradab, yang memiliki nilai-nilai kesopanan, toleran, tidak kasar.

⁶Nicanor Perlas, "Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?", dalam *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>, 2001, diakses tanggal 3 Desember 2014.

⁷ibid.

⁸ibid.

⁹Michael, F. (2007). Mengkaji Konsep Pekabaran Injil GPIB Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Untuk Mewujudkan *Civil Society*. (Undergraduate thesis, Duta Wacana Christian University, 2007). Hal. 37 dalam <http://sinta.ukdw.ac.id> Akses 3 Desember 2014

2. Civil berarti orang, bukan negara berarti sebuah kelompok yang bisa mengatur dirinya sendiri, sementara tugas negara adalah melindungi kelompok tersebut agar dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Civil bukan militer berarti diharapkan tidak ada campur tangan militer.

Maka *Civil Society* adalah “suatu masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri, tanpa campur-tangan pemerintah, dan lepas dari segala paksaan, ancaman kekerasan militer.”

Neera Chandoke: *Civil Society* adalah tempat di mana bisa menghasilkan wacana kritis yang potensial menginterogasi negara. Dengan catatan:¹⁰

- Adanya nilai yang menekankan partisipasi politik dan pertanggungjawaban negara.
- Adanya forum *Civil Society* seperti organisasi organisasi sosial yang merepresentasikan nilai sosial.
- Proteksi *Civil Society* dengan pengakuan dan keberlangsungan hak-hak individu.

Maka dari kedua definisi di atas, penulis menyimpulkan 2 hal sebagai berikut:

1. *Civil Society* merupakan organisasi masyarakat yang berupa institusi, forum, maupun asosiasi- asosiasi. Keterlibatannya anggota di dalam forum tersebut didasarkan atas kesukarelaan, tanpa dipaksa oleh kekuatan negara atau kekuatan militer, melainkan inisiatif warga masyarakat tertentu untuk berkumpul bersama.
2. Institusi atau forum ini memikul nilai-nilai dan norma-norma di atas punggung mereka, sejumlah nilai tersebut yaitu: penegakan hukum, solidaritas, kebebasan, pluralisme, toleransi serta kemerdekaan¹¹, yang melampaui kepentingan-kepentingan sempit dan forum mereka sendiri.

Penulis berfokus membahas *Civil Society*, dikarenakan saat ini Gereja terlalu sibuk mencari posisi untuk berbicara tentang politik dan ekonomi, yang justru menempatkan dirinya di dalam ranah tersebut. Padahal sebenarnya, Gereja sudah memiliki posisi dan kekuatannya sendiri di dalam pilar budaya. Ketimpangan keadaan sosial di Indonesia pun mengaburkan posisi gereja tersebut.

¹⁰Nico-Shulte Nordholt, “Menyokong *Civil Society* dalam Era Kegelisahan” di dalam Sindhunata (Peny.) *Mengenang YB Mangunwijaya Pergulatan Intelektual Dalam Era Kegelisahan*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hal 93

¹¹AS Hikam, “Nadhatul Ulama, *Civil Society*, dan Proyek Pencerahan” di dalam Ahmad Baso (Peny.) *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Hidayah,1999), hal. 16

Muhammad AS Hikam dalam tulisannya memperlihatkan bahwa gerakan agama diperlukan di dalam kehidupan sosial untuk menegakkan perjuangan demi keadilan sosial dalam *Civil Society*. Gerakan keagamaan ini bisa menjadi gerakan sosial (*social movement*) yang reformis.¹² Gerakan ini bisa memperkuat dan memperkaya diskursus politik dan ekonomi melalui mode pemahaman, konsep, dan interpretasinya tentang gagasan-gagasan yang ada di tengah kehidupan sosial. Gerakan ini juga memiliki kemampuan untuk membekali kekuatan (*empowering*) pada masyarakat yang tertindas untuk bangkit dan membarui tatanan sosial yang rusak.¹³ Zakharia Ngelow, mengatakan: “Sumbangan Kekristenan Pada *Civil Society* adalah menghidupkan Spritualitas kemandirian dan sifat kritis profetis gereja Purba terhadap kekuasaan dalam persekutuan dan organisasi organisasi Kristen.”¹⁴

Setelah melihat pemaparan AS Hikam dan Ngelow di atas, penulis mencoba menyimpulkan dua hal yang menjadi nilai positif *Civil Society* yang dapat diterapkan di dalam Gereja:

1. *Civil Society* sebagai institusi tengah bisa mengambil jalan berbeda dengan pemerintah, maka gereja bisa mengambil sikap yang berbeda dengan penguasa, dan bukan hanya bersikap berbeda tetapi gereja juga bisa mengkritisi pilar yang lain seperti politik dan pemerintah.¹⁵
2. *Civil Society* mengandalkam masyarakat pluralis-inklusif sehingga ada wacana pengembangan teologi dengan “yang lain” di tengah konteks keberagaman Indonesia¹⁶

¹²Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996). Hal. 145.

¹³Ibid, Hal. 146-147.

¹⁴Zakharia Ngelow, “Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia”, di dalam Stephen Suleeman (Peny.) *Setia Jurnal Teologi Persetia*, Jakarta: Persetia hal 38

¹⁵*Civil Society* memberikan kritik yang tegas kepada kepada gereja dan oragniazasi Kekristenan. Keterikatan pada penguasa membuat para intelektual Kristen tidak menampilkan pemikiran-pemikiran yang bermakna dalam wacana nasional lih. Zakharia Ngelow “Gereja dan Masyarakat Madani” *Jurnal Setia*, 2000 Jakarta: Persetia hal. 20

¹⁶Kebangkitan wacana *Civil Society* dalam NU, diawali dengan momentum kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 yang mengantarkan Gus Dur sebagai Ketua Umum NU. Gus Dur memperkenalkan pendekatan budaya dalam berhubungan dengan negara sehingga ia dikenal sebagai kelompok Islam budaya, yang dibedakan dengan kelompok Islam Politik. Dari kandungan NU lahir prinsip dualitas Islam-negara, sebagai dasar NU menerima azas tunggal Pancasila. Alasan penerimaan NU terhadap Pancasila berkaitan dengan konsep masyarakat madani, yang menekankan paham pluralisme, yaitu: (1) aspek vertikal, yaitu sifat pluralitas umat (QS al-Hujurat 13) dan adanya satu universal kemanusiaan, sesuai dengan *Perennial Philosophy* (Filsafat Hari Akhir) atau *Religion of the Heart* yang didasarkan pada prinsip kesatuan (tawhid); (2) aspek horisontal, yaitu kemaslahatan umat dalam memutuskan perkara baik politik maupun agama; dan (3) fakta historis bahwa KH A. Wahid Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila, disamping adanya fatwa Mukhtamar NU 1935 di Palembang lih. Saefur Rochmat, *MASYARAKAT MADANI:DIALOG ISLAM DAN MODERNITAS DI INDONESIA* bahan kuliah Fakultas Sejarah UNY, dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/JPK_MASYARAKAT%20MADANI.doc diakses tanggal 3 Desember 2014.

Sependapat dengan AS Hikam dan menyadari peran Kekristenan yang dinyatakan oleh Ngelow, maka penulis mencoba melihat sampai sejauh mana Teologi Kristen, dalam hal ini Pemerintahan Allah dapat menopang *Civil Society* sehingga dapat membangun masyarakat Demokratis.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan:

1. Apakah *Civil Society* itu? (Secara definisi, Struktur Sosial yang akan dibangunnya, dan apa yang menjadi cita cita nya)
2. Bagaimanakah *Civil Society* bila dipertemukan dengan Masyarakat Madani?¹⁷
3. Apakah teologi Kristen bisa menopang *Civil Society*? Sejauh mana Teologi Kristen yang dijabarkan dalam nilai Kristiani bisa memberikan sumbangan pada *Civil Society*

1.4. Batasan Masalah

1. Batasan masalah pada poin pertama Yaitu *Civil Society* adalah pada pandangan tokoh seperti AS Hikam, dan Ahmad Baso
2. Batasan kedua mengenai Pemerintahan Allah akan berfokus pada konsep Pemerintahan Allah yang bisa dijadikan nilai nilai bersama yang menopang Masyarakat Sosial. Berfokus pada Choan Seng Song dalam buku *Yesus dan Pemerintahan Allah* juga Glen Stassen dan David Gushee dalam Buku *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini*.

1.5. Tujuan

Tujuan ditulisnya Skripsi ini:

1. Menjabarkan Konsep *Civil Society* dan Pemerintahan Allah
2. Mencoba menjabarkan sumbangan Teologi Kristen membangun *Civil Society*
3. Menjabarkan konsep Demokrasi Deliberatif sebagai jembatan filosofis antara nilai nilai agama (Pemerintahan Allah) dengan *Civil Society*

¹⁷Melihat masyarakat madani dipandang perlu karena 1. konsep ini juga merupakan *Civil Society* yang berkembang dalam konteks Islam dan sempat menjadi trend di kalangan Islam Indonesia 2. Kesadaran Bahwa Islam adalah mayoritas, dan politik akan selalu bergaya Islam lih. Zakharia Ngelow "Gereja dan Masyarakat Madani" *Jurnal Setia*, Jakarta: Persetia, 1999 hal. 20

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan studi pustaka (pengumpulan data dengan menggunakan literature berupa studi pustaka). Pembahasan deskriptif dilakukan dengan mengolah beberapa sumber-sumber pandangan ahli melalui literatur dan buku buku mengenai topik terkait.

1.7. Judul Skripsi

“Perang Orang Kristen di Indonesia Untuk Membangun *Civil Society*”

1.8. Sistematika Tulisan

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan dan pembatasan atas masalah, tujuan, judul, metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: *Civil Society* di Indonesia

Pada bab ini penulis akan mencoba menjabarkan konsep *Civil Society*. Sembari berusaha menjawab pertanyaan pertama di atas mengenai konsep konsep *Civil Society*. Penulis juga akan berusaha mempertemukan *Civil Society* dan Masyarakat Madani sebagai suatu Konsep *Civil Society* yang dikembangkan Islam.

BAB III: Pemerintahan Allah

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan konsep pemerintahan Allah yang terus disuarakan Yesus dalam pelayanannya. Pemerintahan Allah menjadi Sentral dari konsep etis Kekristenan dan Visi kekristenan melihat dunia (yang di dalamnya ada masyarakat sosial). Dalam bagian ini penulis akan mencoba nilai nilai yang diperjuangkan Yesus yang bisa menjadi sumbangan dalam masyarakat plural.

BAB IV: Keterlibatan Gereja Membangun *Civil Society*

Bagian ini Merupakan upaya Dialog dan Integrasi atas keduanya, apakah Kekristenan bisa menyokong *Civil Society* dan memberikan sumbangannya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi tentang kesimpulan seluruh bab di dalam skripsi ini. Penulis di dalam bab ini juga akan memberikan saran demi upaya pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Akhir

Penulis melihat permasalahan lemahnya politik Indonesia dimulai oleh dua hal; Pertama masyarakat jatuh dalam ketidakpedulian dan lebih memilih untuk mengurus urusan privatnya sendiri daripada memikirkan urusan politik. Ketidakpedulian ini menyebabkan kontrol rakyat sangat minim sehingga kekuasaan negara (pilar politik) semakin merasuk ke seluruh pilar pilar masyarakat sosial . Padahal sumbangan masyarakat sosial dan nilai sosial penting bagi negara dalam membangun pemerintah yang demokratis. Permasalahan kedua muncul berikutnya adalah peran Kekristenan di Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat Sosial. Dalam hal ini mayoritas Kekristenan dibentuk dalam nuansa Pietis (yang tak peduli urusan dunia tetapi tetap berpengharapan akan Kerajaan Surga).

Untuk menjawab permasalahan ini penulis melihat perlunya sebuah upaya penyadaran kepada masyarakat luas, bahwa mereka juga punya andil dalam membangun negara. Seperti yang dijabarkan Nicanor Perlas bahwa kehidupan sosial selalu terdiri atas tiga subsistem penting (*three realms/three subsystems*) yaitu: politik (*politic*), ekonomi (*economy*) dan budaya (*culture*), ketiganya akan terus saling mempengaruhi. Melihat konteks Indonesia penulis melihat ada ketimpangan dalam 3 pilar tersebut, pengembangan pilar sosial tersebut lebih sering terjadi di pilar politik. Misalkan untuk kasus korupsi, ketika korupsi semakin merajela kebijakan yang lebih sering terdengar adalah penguatan hukum dengan memberi hukuman seberat beratnya yaitu pilar politik. Dan yang kedua adalah kenaikan gaji yang merupakan bagian pilar ekonomi. Sedangkan pilar budaya penulis rasa masih menjadi yang kurang dikembangkan, misalkan budaya anti korupsi sudah dikembangkan sebagai nilai yang dipegang teguh tentu saja menjadi pencegahan yang baik. Inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan lebih dalam pilar ketiga yaitu budaya dengan aktor utamanya di dalamnya adalah *Civil Society*.

Civil Society adalah masyarakat, masyarakat dapat bercita-cita untuk mengubah atau mereformasi negara/ struktur kekuasaan untuk kesejahteraan bersama. Tetapi tidak bertujuan mengendalikan negara atau mendapatkan posisi kuat (untuk kelompok maupun individu) di dalamnya. Umumnya para pemikir sepakat bahwa tetap ada hubungan erat antara keberadaan *Civil Society* dengan negara dengan tujuan utama meningkatkan vitalitas dan kesejahteraan kehidupan sosial dan politiknya. Dalam pembentukan nilai – nilai budaya tersebut, semua

pihak berhak untuk ikut membangun begitu pula kekristenan. Bila Islam bisa turut membangun dengan mewujudkan masyarakat madani maka Kristen juga bisa membangun teologinya untuk menyokong *Civil Society*. Pemerintahan Allah yang merupakan visi Yesus menjadi pilihan penulis. Visi Yesus ini merupakan tema central dalam teologi Kristen, dan dari visi tersebut muncul refleksi refleksi atas nilai Kristen untuk menjawab konteks masyarakat luas. Melalui pengembangan lebih dalam atas nilai-nilai tersebut kekristenan diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih dalam membangun pilar sosial.

Tetapi sering terjadi adalah kesalahpahaman terhadap pemaknaan visi Yesus ini. Kebanyakan pemahaman tentang pemerintahan Allah selalu di bawah ke ranah eksklusif untuk kepentingan Kristen. Maka penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Allah hadir untuk semua makhluk tanpa melihat tembok pemisah, dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat. Sehingga gereja bukan menjadi komunitas terasing di tengah dunia, mempunyai sikap serta memiliki arah/ cara pandang yang jelas dalam membangun dunia.

Bagi penulis gereja adalah bagian dari *Civil Society* gereja seharusnya tidak mengambil porsi besar dalam politik dan ekonomi. Tugas gereja sebagai garam dan terang dunia haruslah mencerahkan pola pikir jemaatnya melalui pengembangan pilar budaya. Melalui gereja lah nilai kristiani dan konsep etis dibangun. Gereja adalah perintis pembentukan nilai-nilai yang membangun *Civil Society*. Perintis ini setia kepada Allah karena ia bersumber dari Allah dan berproses untuk Allah. Seperti Martin Luther King, dia seorang pendeta dia menyatakan panggilan nya hanya sebagai pendeta dan melayani dalam komunitas Kristen. Tetapi mengenai pergerakannya sebagai seorang *civil rights movements* adalah juga merasa itu juga bagaikan dari pelayanannya sebagai seorang Kristen, karena khotbah harus memiliki konsen pada manusia. Penulis rasa inilah contoh yang disebut gereja perintis yang merespon panggilan Allah. King adalah satu tokoh yang bergerak dalam ruang publik ia berpendapat dan memberikan argumen, dan kemudian tindakan serta argumennya mempengaruhi yang lain dalam pembentukan opini. Visi yang dibawa King adalah pembebasan, kesetaraan, kecondongan yang tertindas visi nyata kerajaan Allah. Visi ini membentuk pilar sosial di AS masa itu menjadi lebih beradab. Apa yang dilakukan King adalah salah satu contoh bahwa Pemerintahan Allah membentuk dunia menjadi *Civilized Society/Civil Society*.

5.2 Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut

Civil Society dapat berkembang dalam ruang publik yang baik. Di dalam ruangan inilah *Civil Society* terbangun konsepnya. Ruang publik digambarkan sebagai suatu jaringan untuk mengkomunikasikan pandangan pandangan (yakni opini-opini yang mengekspresikan sikap-sikap positif atau negatif), aliran- aliran komunikasi yang disintesiskan dalam suatu cara sebagai opini-opini publik. Ruang publik harus selalu dilihat sebagai konsep bersifat bebas dan cair karena begitu banyak pengenaan definisi di atasnya, Habermas seperti yang dikutip di atas adalah salah satu tokoh yang menawarkan konsep. Maka perlu disadari bahwa ruang publik adalah arena terbuka yang diperebutkan, karena ia diperebutkan ia dapat digiring ke mana saja.¹²⁰ Kita perlu menyadari bahwa aktor utama dalam ruang publik adalah *Civil Society* tetapi juga ada aktor aktor lain di dalamnya ada pemerintah dan militer dari pilar politik, Agama, Sains, Budaya Global, Media,CSO/NGO,dsb. Mereka semua ikut andil dalam ruang publik dan pasti akan berusaha mengarahkan ruang publik untuk kepentingan kelompoknya. Habermas memang sudah memberikan syarat yang tegas apa itu Ruang Publik yang baik. Tapi bila kembali kepada realitas, kekuatan- kekuatan yang ada di dalamnya akan selalu bersaing bahkan mungkin akan melakukan kolusi satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh misalkan Surat Kabar adalah bentuk kekuatan media mereka memilik visi tersendiri untuk ruang publik, tetapi mereka juga berelasi dengan partai politik untuk mengarahkan suara, atau berelasi dengan bisnis sebagai pemilik saham. Relasi- relasi inilah yang akhirnya membuat ruang publik begitu cair dan bebas. Herry-Priyono menjabarkan diagnosis nya atas kemungkinan- kemungkinan yang terjadi dalam Ruang Publik:¹²¹

1. Ruang Publik bukan lagi arena pembentukan *Public civility* (Keberadaban Publik) tetapi menjadi ranah komersial (*Commercial domain*) . Publik yang dimaksud adalah sebuah konsep bersama/kelompok, bahwa ruang publik selalu dibentuk dari perwakilan kelompok kelompok tertentu. Tetapi jika yang dibangun komersial maka akan menguatkan konsep privatisasi pasar yang mengarahkan pada kebutuhan individu atau mungkin bisa menjadi politik identitas tertentu. Yang jelas politik identitas bisa meleakaskan dari dominasi, tetapi bisa juga mencegah kemungkinan aksi bersama.

¹²⁰B. Herry-Priyono, *Menyelamatkan Ruang Publik* di dalam Budi Hardiman, *Ruang Publik:Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace.*(Yogyakarta:Kanisius,2010)

¹²¹Ibid Hal. 382-384

2. Permasalahan berikutnya dari ranah komersial adalah .Penggunaan Ruang Publik menjadi sekedar komoditas komersial, bukan lagi pembentukan watak sosial. Sehingga kinerja ruang publik hanya bergantung pada laba saja.
3. Maka akhirnya kita kehilangan fungsi pendidikan yang bermutu dari ruang publik. Karena semua nya akan tergantung *purchasing power* (daya beli) atas barang dan jasa yang dicakup dalam ruang publik.

Dari penjabaran ini penulis merasa penelitian tentang “penyelamatan” Ruang Publik bisa menjadi isu yang menarik. Untuk mendukung *Civil Society*.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney, Bernard, ”*Civil Society dan Abrahamic Religion*”, di dalam Jurnal Teologi GEMA Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 2008
- Ahmad, Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkelogi Pemikiran di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Amil Piliang, Yasraf, Pengantar *Jika Rakyat Berkuasa*.
Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999
- Bonhoeffer, Dietrich, *Ethics*. New York: The MacMillan Company, 1955
- Darmaputera, Eka, “Pancasila dan Pergulatan identitas Gereja: Wawancara dengan Eka Darma putra” di dalam Martin L Sinaga, *Pergulatan Kristen di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- Darragh, Neil, *The Realm of God as Strategic Involment in Comunity Development*, dalam Australian eJournal of Theology 18.1 (April 2011): Hal. 50
http://aejt.com.au/_data/assets/pdf_file/008/32556/4_AEJT11.06_Formatted_Darragh_The_Realm_of_God_copyedited.pdf diakses 27 May 2015
- Diamond, Larry J., , *Developing Democracy: toward Consolidation*. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1999
- Dodd ,C H, *The Parabels of Kingdom*. London: The Whitefriars, 1935
- Michael, F, “Mengkaji Konsep Pekabaran Injil Gpib Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Untuk Mewujudkan *Civil Society*”. Undergraduate thesis, Duta Wacana Christian University, 2007. dalam <http://sinta.ukdw.ac.id> Akses 3 DseMBER 2014
- Fergusson, David, *Church, State and Civil Society*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004
- Gruchy, John de, *Saksi Bagi Kristus: Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003
- Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action, Jilid II*. Boston: Beacon Press, 1987

- Hannan, Margareth, *The Nature and Demand of Sovereign Rule of God* London: T&T Clarck,2006
- Hardiman, F. Budi, *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis Sampai Cyberspace* Yogyakarta: Kanisius,2010
- Herry-Priyono,B, “Menyelamatkan Ruang Publik” dalam Budi Hardiman (Peny),*Ruang Publik:Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace.* Yogyakarta:Kanisius,2010
- Hikam, AS, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- _____, “Nadhatul Ulama, *Civil Society*, dan Proyek Pencerahan” di dalam Ahmad Baso(Peny.) *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society”* dalam Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah,1999
- Jones, Sidney, *Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran*, Di dalam Husni Mubarak(peny.) *Sisi Gelap Demokrasi* (Jakarta:PUSAD Paramadina,2013) Hal 14-20
- Kolimon, Merry, “Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil”, di dalam Zakharia Ngelow dan Julianus Mojau(Peny.), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik PascaOrde Baru*,Makasar: Yayasan Oase Intim,2013
- Lee,V. Beitinger, (Un) *Civil Society and political change in Indonesia : a contested arena*, New York: Routledge,2010
- Menoh,Gusti, *Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta:Kanisius, 2015
- Ngelow, Zakharia “Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia” di dalam Stephen Suleeman(Peny.) *Setia Jurnal Teologi Persetia*, Jakarta: Persetia,1998
- Nordholt, Nico-Shulte, “Menyokong *Civil Society* dalam Era Kegelisahan”, di dalam Sindhunata(Peny.) *Mengenang YB Mangunwijaya Pergulatan Intelektual Dalam Era Kegelisahan*, Yogyakarta: Kanisius 2003
- Pennington, Jonathan T, *The Kingdom of Heaven Against All Earthy Kingdom*. Dalam <http://jonathanpennington.com/wp-content/uploads/Pennington-KOH.pdf> diakses 27 Mei 2015

Perlas, Nicanor, "Social Threefolding", di dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>, diakses tanggal 3 Desember 2014.

_____, "Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?", dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, 2001, dalam <http://www.globenet3.org/ch15.shtml>, diakses tanggal 3 Desember 2014.

Poehlmann, Horst G, *Allah itu Allah: Potret 6 Teolog Besar Kristen Protestan Abad Ini* Flores: Nusa Indah, 1998

Rochmat, Saefur, *MASYARAKAT MADANI: DIALOG ISLAM DAN MODERNITAS DI INDONESIA*, dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/JPK_MASYARAKAT%20MADANI.doc diakses tanggal 3 Desember 2014.

Sutanto, Trisno, "Agama Agama dan Proyek Demkro(tisa)si", di dalam Zakharia Ngelow dan Julianus Mojau (Peny.), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik PascaOrde Baru*, Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013

_____, "Menembus jalan Buntu Pancasila" Dalam *Jurnal Teologi Penuntun* Jakarta: Komisi Teologi GKI SW Jabar, 2008

Singgih, Emmanuel, Gerrit, Ph.D, "Etnisitas, Kebangsaan, dan Gereja: Pergumulan Kristen di Indonesia Pada Awal Abad 21, dalam *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005

_____, "Kebangsaan dan Gereja: Pergumulan Awal Kristen di Indonesia pada Awal Abad 21", Dalam *Mengatasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Melinium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005

_____, *Iman & Politik dalam Era Reformasi di Indonesia* Jakarta: BPK, 2000

Song, Choan-Seng, *Yesus dan Pemerintahan Allah* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010

Stassen, Glen H & Gushe, David P, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*, Surabaya: Penerbit Momentum, 2008

Sujatmiko, Iwan Gardono, , “Wacana ‘*Civil Society*’ di Indonesia”,di dalam Burnahuddin (peny.), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*. Jarkarta: INCIS,2003

Widjaja,Paulus S,*Keadilan Allah Dalam Kitab Injl Siproptik*,Semarang: Pustaka Muria,2013

_____,“Membangun teologi politis di Inodensia: Dari Teologi Sukses kearah Teologi Pelayanan dan Doksologi”. dalam *Jurnal Teologi GEMA*. Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 2004

Woodley, Matt, “The Gospel of Matthew: God With Us” dalam *Practical Works of Richard Baxter*. Morgan: Soli Deo Gloria Publications, 2000

Yewangoe, Andreas, *Pilar Civil Society* di dalam

<http://www.leimena.org/id/page/v/407/pilar-civil-society> diakses 30 Juni 2015

©UKDW